



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 173 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan – Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

36. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 141 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 141 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 67 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 67);
37. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang direncanakan.

Rencana Kerja Tahun 2023 tersebut disusun untuk melanjutkan program pembangunan dan meningkatkan pencapaian target pada tahun sebelumnya. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2023 berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan dasar dan peningkatan pembangunan ekonomi daerah yang didukung oleh Pengembangan Infrastruktur Daerah, Reformasi Birokrasi dan kondusifitas daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dasar perumusan tujuan jenis kegiatan, kelompok sasaran, hasil, manfaat dan lokasi serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran, program dan pagu indikatif yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disusun kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 serta memperhatikan keselarasan dan konsistensinya terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran teknis operasional Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan visi dan misi pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan dan dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas, organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2012 Nomor 19);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 05 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05);
- n. Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 050/0106 /404.401/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan - tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

a. Maksud

Rencana kerja ini disusun sebagai :

- a) Pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan kegiatannya.
- b) Pedoman bagi Pembangunan Rencana Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung dan memfasilitasi kelancaran kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Alat ukur dalam melakukan evaluasi kinerja, pengkajian dan peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Tujuan

Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme dan Berwibawa, serta terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang sesuai dan selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.5. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (dituangkan saat RPJMD telah ditetapkan), Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.6. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.7. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.8. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

- BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang lain langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah bersangkutan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan kegiatan oleh pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- BAB. IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Berisikan penjelasan mengenai :
- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Meliputi :
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - 2) Pencapaian SDGs;
 - 3) Pengentasan kemiskinan;
 - 4) Pencapaian NSPK dan SPM;
 - 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir.
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan, antara lain meliputi :
 - 1) Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan;

- 2) Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan, dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - 4) Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/Sub Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - 5) Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, baik jenis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, baik jenis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

- BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra PD pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun capaian Kinerja Renja Tahun 2022 sampai pada Triwulan I secara fisik rata – rata mencapai 13,22% sedangkan untuk keuangan hanya 9,79%.

Adapun pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
 dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kab. Ngawi s/d Tahun (n-1/tahun berjalan)
 Kabupaten Ngawi**

Kode	Usana/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun (n-1/tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
4 02	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD						8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	6 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	6 dok	6 dok
		Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun	4 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dok	4 dok
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	6 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	6 dok	6 dok
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1170 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1170 kali	1170 kali
		Jumlah dokumen pengaluan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	26 dok	26 dok
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	1 dok
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	48 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	48 dok	48 dok
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dok	2 dok
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasinya kepegawaian dalam setahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibel/didadakan	70 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	70 stel	70 stel
		Jumlah pakaian batik yang dibel/didadakan	45 potong	N/A	N/A	N/A	N/A	45 potong	45 potong
		Jumlah pakaian olahraga yang dibel/didadakan	45 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	45 stel	45 stel
		Jumlah atribut pakaian yang dibel/didadakan	45 buah	N/A	N/A	N/A	N/A	45 buah	45 buah
		Jumlah sepatu olahraga yang dibel/didadakan	45 pasang	N/A	N/A	N/A	N/A	45 pasang	45 pasang
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	47 orang	47 orang
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan yang disediakan	13075 korak	N/A	N/A	N/A	N/A	13075 korak	13075 korak
		Jumlah minuman yang disediakan	13075 dos	N/A	N/A	N/A	N/A	13075 dos	13075 dos
		Jumlah air isi ulang yang disediakan	100 galon	N/A	N/A	N/A	N/A	100 galon	100 galon

4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	2434 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	2434 lembar	2434 lembar
						Jumlah barang yang digandakan	6218615 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	6218615 lembar	6218615 lembar
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah iklan/publikasi media cetak	360 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	360 kali	360 kali
						Jumlah surat kabar yang disediakan	6935 eksemplar	N/A	N/A	N/A	N/A	6935 eksemplar	6935 eksemplar
						Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	buku	N/A	N/A	N/A	N/A	buku	buku
4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diadain/dilakuti	120 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	120 kali	120 kali
						Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diadain/dilakuti	120 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	120 kali	120 kali
4	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	4 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	4 unit	4 unit
4	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	4 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	4 unit	4 unit
4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	7500 surat	N/A	N/A	N/A	N/A	7500 surat	7500 surat
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar	48 rekening	N/A	N/A	N/A	N/A	48 rekening	48 rekening
						Jumlah rekening listrik yang dibayar	12 rekening	N/A	N/A	N/A	N/A	12 rekening	12 rekening
						Jumlah rekening air yang dibayar	12 rekening	N/A	N/A	N/A	N/A	12 rekening	12 rekening
						Jumlah rekening internet yang dibayar	24 rekening	N/A	N/A	N/A	N/A	24 rekening	24 rekening
4	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penambahan daya listrik	KWH	N/A	N/A	N/A	N/A	KWH	KWH
						Jumlah pemasangan daya listrik	titik	N/A	N/A	N/A	N/A	titik	titik
						Jumlah alat kebersihan yang dibeli	20 buah	N/A	N/A	N/A	N/A	20 buah	20 buah
						Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	2078 buah	N/A	N/A	N/A	N/A	2078 buah	2078 buah
						Jumlah pembayaran jasa kebersihan	72 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	72 kali	72 kali
						Jumlah pembayaran jasa keamanan	96 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	96 kali	96 kali
						Jumlah pembayaran jasa operator	24 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	24 kali	24 kali
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor	144 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	144 kali	144 kali
						Jumlah pembayaran lembur	144 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	144 kali	144 kali
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	240 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	240 kali	240 kali
4	02	01	2,09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar pagalnya	16 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	16 unit	16 unit
						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	240 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	240 kali	240 kali
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	16 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	16 unit	16 unit
4	02	01	2,09	06	Pemeliharaan meubelair	Jumlah pemeliharaan meubelair	240 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	240 kali	240 kali
4	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	48 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	48 kali	48 kali
4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	3085 m2	N/A	N/A	N/A	N/A	3085 m2	3085 m2
4	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	72 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	72 kali	72 kali
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dalam satu tahun	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	01	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakuan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakuan Dinas dan Atribut DPRD dalam satu tahun	180 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	180 stel	180 stel
4	02	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD dalam satu tahun	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	1 kali
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD dalam satu tahun	45 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	45 stel	45 stel

4	02	01	2,16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Administrasi Keanggotaan DPRD yang terseleenggara	45 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	45 stel	45 stel
4	02	01	2,16	02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat DPRD yang terfasilitasi	45 set	N/A	N/A	N/A	N/A	45 set	45 set
4	02	01	2,16	03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	1 kali
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang tersedia	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Seluruh	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	23 perda	N/A	N/A	N/A	N/A	23 perda	23 perda
4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang tersusun	23 perda	N/A	N/A	N/A	N/A	23 perda	23 perda
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan	69 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	69 kali	69 kali
4	02	02	2,01	04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terseleenggara	7 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	7 kali	7 kali
4	02	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang terseleenggara	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	1 kali
4	02	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terseleenggara	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	1 kali
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang terseleenggara	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	1 kali
4	02	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang terseleenggara	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	1 kali
4	02	02	2,02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang terseleenggara	2 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kali	2 kali
4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang terseleenggara	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	1 kali
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	84 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	84 kali	84 kali
4	02	02	2,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	12 kali
4	02	02	2,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	12 kali
4	02	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	12 kali
4	02	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dalam satu tahun	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	12 kali
4	02	02	2,03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam satu tahun	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	12 kali
4	02	02	2,03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran dalam satu tahun	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	12 kali
4	02	02	2,03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam satu tahun	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	12 kali
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek dan bersertifikat	45 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	45 orang	45 orang
4	02	02	2,04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Orientasi DPRD yang diikuti	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	1 kali
4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan DPRD yang terpublikasi dan terdokumentasikan	264 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	264 kali	264 kali
4	02	02	2,04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	16 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	16 orang	16 orang
4	02	02	2,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	6 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	6 orang	6 orang
4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Hubungan Masyarakat yang terseleenggara	264 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	264 kali	264 kali

4	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD yang tersusun	1 dok	N/A	N/A	N/A	1 dok	1 dok
4	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam satu tahun	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Kunjungan Kerja dalam Daerah	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	438 pokok	N/A	N/A	N/A	438 pokok	438 pokok
4	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses dalam satu masa sidang per tahun	3 kali	N/A	N/A	N/A	3 kali	3 kali
4	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode etik DPRD yang tersusun	1 dok	N/A	N/A	N/A	1 dok	1 dok
4	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode etik DPRD yang terlaksana	360 kali	N/A	N/A	N/A	360 kali	360 kali
4	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terselenggara	120 kali	N/A	N/A	N/A	120 kali	120 kali
4	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	1 dok	N/A	N/A	N/A	1 dok	1 dok
4	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang terfasilitasi	48 kali	N/A	N/A	N/A	48 kali	48 kali
					Jumlah Kajian Kinerja DPRD yang terfasilitasi	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	2 dokumen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mendukung tugas-tugas dan program-program lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi.

Untuk mengetahui secara jelas pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 2. 2.

Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dalam satu tahun	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut DPRD dalam satu tahun	N/A	180 stel	180 stel	180 stel	180 stel	N/A	180 stel	180 stel	180 stel	180 stel	180 stel
Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD dalam satu tahun	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Persentase Layanan Administrasi DPRD dalam satu tahun	N/A	45 stel	45 stel	45 stel	45 stel	N/A	45 stel	45 stel	45 stel	45 stel	45 stel
Persentase Administrasi Keanggotaan DPRD yang terselenggara	N/A	45 stel	45 stel	45 stel	45 stel	N/A	45 stel	45 stel	45 stel	45 stel	45 stel
Jumlah Fraksi DPRD yang terfasilitasi	N/A	45 set	45 set	45 set	45 set	N/A	45 set	45 set	45 set	45 set	45 set
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Persentase Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang tersedia	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Setahun	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	N/A	23 perda	23 perda	23 perda	23 perda	N/A	23 perda	23 perda	23 perda	23 perda	23 perda
Jumlah Peraturan Daerah yang tersusun	N/A	23 perda	23 perda	23 perda	23 perda	N/A	23 perda	23 perda	23 perda	23 perda	23 perda
Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terlaksana	N/A	69 kali	69 kali	69 kali	69 kali	N/A	69 kali	69 kali	69 kali	69 kali	69 kali
Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	N/A	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	N/A	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terselenggara	N/A	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	N/A	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali
Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang terselenggara	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terselenggara	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah Pembahasan APBD yang terselenggara	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang terselenggara	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang terselenggara	N/A	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	N/A	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang terselenggara	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	N/A	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terlaksana dalam satu tahun	N/A	84 kali	84 kali	84 kali	84 kali	N/A	84 kali	84 kali	84 kali	84 kali	84 kali
Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang terlaksana dalam satu tahun	N/A	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	N/A	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang terlaksana dalam satu tahun	N/A	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	N/A	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- Tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan professional
- Tersedianya sarana Sekretariat DPRD yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada DPRD
- Adanya sistem pelayanan Sekretariat DPRD yang responsip
- Adanya peran serta masyarakat yang baik untuk mewujudkan kemandirian
- Adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektoral
- Tersedianya dana yang cukup untuk kegiatan Sekretariat DPRD
- Adanya Peraturan daerah yang terlaksana.
- Dukungan Legislatif
- Kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melaksanakan review Rancangan awal RKPD merupakan proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan OPD yang banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Besarnya dana dalam Rancangan Awal RKPD dengan realisasinya tidak sesuai.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi

No	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan					Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Target Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	80 %	33.299.134.693	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	80 %	33.299.134.693	12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	607.979.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	607.979.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	4 dokumen 6 dokumen	513.279.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	4 dokumen 6 dokumen	513.279.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	6 dokumen	94.700.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	6 dokumen	94.700.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	4.695.275.774	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	4.695.275.774	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun Jumlah ASN yang disetujui pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dokumen 1170 kali	4.530.558.774	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun Jumlah ASN yang disetujui pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dokumen 1170 kali	4.530.558.774	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	111.917.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	111.917.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	48 dokumen 2 dokumen	52.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	48 dokumen 2 dokumen	52.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun	100 %	232.620.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun	100 %	232.620.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi	Jumlah atribut pakaian yang dibeli/disediakan Jumlah atribut pakaian yang disediakan Jumlah atribut pakaian dinas yang disediakan Jumlah atribut pakaian dinas yang disediakan Jumlah atribut pakaian dinas yang disediakan Jumlah atribut pakaian dinas yang disediakan	45 buah 45 potong 70 stel 45 stel 45 pasang	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ngawi	Jumlah atribut pakaian yang dibeli/disediakan Jumlah atribut pakaian yang disediakan Jumlah atribut pakaian dinas yang disediakan Jumlah atribut pakaian dinas yang disediakan Jumlah atribut pakaian dinas yang disediakan Jumlah atribut pakaian dinas yang disediakan	45 buah 45 potong 70 stel 45 stel 45 pasang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 orang	232.620.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 orang	232.620.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	1.736.150.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	1.736.150.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	127.460.550	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	127.460.550	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	194.653.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	194.653.150	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah air isi ulang yang disediakan Jumlah makanan yang disediakan Jumlah minuman yang disediakan	100 galon 13075 dus kotak 13075 dus	533.040.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah air isi ulang yang disediakan Jumlah makanan yang disediakan Jumlah minuman yang disediakan	100 galon 13075 dus kotak 13075 dus	533.040.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ngawi	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan Jumlah iktan/publikasi media cetak	2434 lembar 621815 lembar 360 kali	385.052.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ngawi	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan Jumlah iktan/publikasi media cetak	2434 lembar 621815 lembar 360 kali	385.052.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	Jumlah surat kabar yang disediakan	6935 eksemplar	18.604.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	Jumlah surat kabar yang disediakan	6935 eksemplar	18.604.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah iktan/publikasi media cetak Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/dikuti Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/dikuti	360 kali 120 kali 120 kali	477.340.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi	Jumlah iktan/publikasi media cetak Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/dikuti Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/dikuti	360 kali 120 kali 120 kali	477.340.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Ngawi	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	391.509.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	391.509.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	391.509.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	391.509.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah dalam setahun	1.205.563.556	1.205.563.556	100 %	1.205.563.556	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	1.205.563.556
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	2.965.000	2.965.000	4 unit	2.965.000	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	4 unit	2.965.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ngawi	Jumlah rekening air yang dibayar	614.481.750	614.481.750	rekening 24	614.481.750	Jumlah rekening internet yang dibayar	rekening 12	614.481.750
Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelelangan Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah rekening listrik yang dibayar	286.668.806	286.668.806	rekening 24	286.668.806	Jumlah rekening telepon yang dibayar	rekening 24	286.668.806
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ngawi	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	301.446.000	301.446.000	20 buah	301.446.000	Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	2076 buah	301.446.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah jasa keamanan	1.277.636.780	1.277.636.780	96 kali	1.277.636.780	Jumlah pembayaran jasa keamanan	96 kali	1.277.636.780
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	356.275.180	356.275.180	72 kali	356.275.180	Jumlah pembayaran jasa kebersihan	72 kali	356.275.180
Pemeliharaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi	Jumlah pembayaran jasa operator	22.207.420.263	22.207.420.263	24 kali	22.207.420.263	Jumlah pembayaran jasa operator	24 kali	22.207.420.263
Pemeliharaan Mebel	Kab. Ngawi	Jumlah pembayaran honor	293.450.000	293.450.000	144 kali	293.450.000	Jumlah pembayaran honor	144 kali	293.450.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah pembayaran lembur	458.161.600	458.161.600	144 kali	458.161.600	Jumlah pembayaran lembur	144 kali	458.161.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	167.750.000	167.750.000	100 %	167.750.000	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %	167.750.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ngawi	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	22.913.785.283	22.913.785.283	20 unit	22.913.785.283	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar	20 unit	22.913.785.283
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	22.207.420.263	22.207.420.263	240 kali	22.207.420.263	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar	240 kali	22.207.420.263
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah pemeliharaan mebel	90.000.000	90.000.000	360 kali	90.000.000	Jumlah pemeliharaan mebel	360 kali	90.000.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	238.615.000	238.615.000	360 kali	238.615.000	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	360 kali	238.615.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Ngawi	luas gedung kantor yang dipelihara	214.000.000	214.000.000	3.085 m2	214.000.000	luas gedung kantor yang dipelihara	3.085 m2	214.000.000
Layanan Administrasi DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.794.106.500	17.794.106.500	72 kali	17.794.106.500	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	72 kali	17.794.106.500
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dalam satu tahun	22.207.420.263	22.207.420.263	100 %	22.207.420.263	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dalam satu tahun	100 %	22.207.420.263
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	616.365.000	616.365.000	100 %	616.365.000	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	616.365.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Penyediaan Atribut DPRD dalam satu tahun	80.000.000	80.000.000	45 set	80.000.000	Jumlah Penyediaan Atribut DPRD dalam satu tahun	45 set	80.000.000
Layanan Administrasi DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dalam satu tahun	22.207.420.263	22.207.420.263	45 stel	22.207.420.263	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dalam satu tahun	45 stel	22.207.420.263
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Anggota DPRD dalam satu tahun	238.615.000	238.615.000	1 kali	238.615.000	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Anggota DPRD dalam satu tahun	1 kali	238.615.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terselenggara	214.000.000	214.000.000	100 %	214.000.000	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terselenggara	100 %	214.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Fraksi DPRD yang terfasilitasi	24.615.000	24.615.000	6 fraksi	24.615.000	Jumlah Fraksi DPRD yang terfasilitasi	6 fraksi	24.615.000
Layanan Administrasi DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	0	0	120 kali	0	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	120 kali	0
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang tersedia	17.794.106.500	17.794.106.500	100 %	17.794.106.500	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang tersedia	100 %	17.794.106.500
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Setahun	0	0	80 %	0	Persentase Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Setahun	80 %	0
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Rencana Tahunan (RKPD) yang disusun dan terintegrasi	0	0	80 %	0	Persentase Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Rencana Tahunan (RKPD) yang disusun dan terintegrasi	80 %	0
Layanan Administrasi DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	3.191.060.000	3.191.060.000	23 Perda	3.191.060.000	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	23 Perda	3.191.060.000
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Peraturan Daerah yang tersusun	2.366.745.000	2.366.745.000	23 Perda	2.366.745.000	Jumlah Peraturan Daerah yang tersusun	23 Perda	2.366.745.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terakassa	445.675.000	445.675.000	23 Rancangan	445.675.000	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terakassa	23 Rancangan	445.675.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	378.640.000	378.640.000	5 dokumen	378.640.000	Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	5 dokumen	378.640.000
Layanan Administrasi DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terselenggara	865.560.000	865.560.000	7 kali	865.560.000	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terselenggara	7 kali	865.560.000

Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang terselenggara	1 kali	144.260.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang terselenggara	1 kali	144.260.000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terselenggara	1 kali	144.260.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terselenggara	1 kali	144.260.000
Pembahasan APBD	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan APBD yang terselenggara	1 kali	144.260.000	Pembahasan APBD	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan APBD yang terselenggara	1 kali	144.260.000
Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang terselenggara	1 kali	144.260.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang terselenggara	1 kali	144.260.000
Pembahasan Laporan Semester	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang terselenggara	2 kali	144.260.000	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang terselenggara	2 kali	144.260.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang terselenggara	1 kali	144.260.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang terselenggara	1 kali	144.260.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terlaksana dalam satu tahun	12 kali	7.361.250.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terlaksana dalam satu tahun	12 kali	7.361.250.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum yang terlaksana dalam satu tahun	240 kali	1.622.425.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum yang terlaksana dalam satu tahun	240 kali	1.622.425.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang terlaksana dalam satu tahun	240 kali	1.756.045.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang terlaksana dalam satu tahun	240 kali	1.756.045.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana dalam satu tahun	240 kali	1.607.250.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana dalam satu tahun	240 kali	1.607.250.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	240 kali	1.607.550.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	240 kali	1.607.550.000
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan dalam satu tahun	240 kali	144.260.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan dalam satu tahun	240 kali	144.260.000
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran dalam satu tahun	240 kali	477.460.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran dalam satu tahun	240 kali	477.460.000
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam satu tahun	12 kali	144.260.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam satu tahun	12 kali	144.260.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Blimtek dan bersertifikat	45 orang	2.249.852.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Blimtek dan bersertifikat	45 orang	2.249.852.000
Bimbingan Teknis DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Bimtek DPRD yang diikuti	6 kali	880.170.000	Bimbingan Teknis DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Bimtek DPRD yang diikuti	6 kali	880.170.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Ngawi	Jumlah kegiatan DPRD yang terpublikasi dan terdokumentasikan	264 kali	517.702.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Ngawi	Jumlah kegiatan DPRD yang terpublikasi dan terdokumentasikan	264 kali	517.702.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Ngawi	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	16 orang	108.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Ngawi	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	16 orang	108.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Ngawi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	6 orang	0	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Ngawi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	6 orang	0
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Ngawi	Jumlah Hubungan Masyarakat yang terselenggara	264 kali	743.980.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Ngawi	Jumlah Hubungan Masyarakat yang terselenggara	264 kali	743.980.000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Program Kerja DPRD yang tersusun	1 dokumen	0	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Program Kerja DPRD yang tersusun	1 dokumen	0
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Ngawi	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam satu tahun	100 %	1.624.027.500	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Ngawi	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam satu tahun	100 %	1.624.027.500
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Ngawi	Persentase Kunjungan Kerja dalam Daerah	100 %	0	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Ngawi	Persentase Kunjungan Kerja dalam Daerah	100 %	0
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	438 Pokir DPRD	29.657.500	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	438 Pokir DPRD	29.657.500
Pelaksanaan Reses	Kab. Ngawi	Jumlah Kegiatan Reses dalam satu masa sidang per tahun	3 kali	1.564.370.000	Pelaksanaan Reses	Kab. Ngawi	Jumlah Kegiatan Reses dalam satu masa sidang per tahun	3 kali	1.564.370.000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	346.845.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	346.845.000
Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Kode etik DPRD yang tersusun	1 dokumen	79.662.500	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Dokumen Kode etik DPRD yang tersusun	1 dokumen	79.662.500
Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Kode etik DPRD yang terlaksana	360 kali	267.162.500	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Pengawasan Kode etik DPRD yang terlaksana	360 kali	267.162.500
Facilitasi Tugas DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Facilitasi Tugas DPRD	100 %	2.155.512.000	Facilitasi Tugas DPRD	Kab. Ngawi	Persentase Facilitasi Tugas DPRD	100 %	2.155.512.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terselenggara	120 kali	1.239.871.600	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terselenggara	120 kali	1.239.871.600
Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	1 dokumen	475.170.000	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	1 dokumen	475.170.000
Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Kajian Kinerja DPRD yang terfasilitasi Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang terfasilitasi	2 dokumen 48 kali	440.470.400	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Ngawi	Jumlah Kajian Kinerja DPRD yang terfasilitasi Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang terfasilitasi	2 dokumen 48 kali	440.470.400

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi mendasar atas usulan dari pemangku kepentingan masing-masing bidang.

Dari usulan program dan kegiatan tersebut mengacu pada isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Tabel 2.5
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

Nama PD : Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi antara lain :

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 yang disusun merupakan proses yang harus dilaksanakan agar Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra dapat tercapai.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

1. Tujuan Renstra

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

2. Sasaran Renstra

Meningkatnya kinerja DPRD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGAWI

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi periode 2021 – 2026.

Adapun Tabel rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Ngawi Tahun 2023 (Tahun Rencana)
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (Tahun n+1)
Kabupaten Ngawi

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun n				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun (n+1)	
	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 02		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 02 01		SEKRETARIAT DPRD			85 %	51.093.241.193			90 %	62.361.505.524
4 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi	85 %	33.299.134.693			90 %	37.361.625.524
4 02 01 2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi	100 %	607.979.000			100 %	850.000.000
4 02 01 2,01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Kab. Ngawi	4 dokumen 6 dokumen	513.279.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN TRANSFER [DANA UMUM] - Dana	4 dokumen 6 dokumen		550.000.000
4 02 01 2,01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun		6 dokumen	94.700.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6 dokumen		300.000.000
4 02 01 2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi	100 %	4.695.275.774			100 %	4.780.558.774
4 02 01 2,02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kab. Ngawi	26 dokumen 1170 kali	4.530.556.774	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	26 dokumen 1170 kali		4.550.558.774
4 02 01 2,02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kab. Ngawi	1 dokumen	111.917.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen		150.000.000
4 02 01 2,02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Kab. Ngawi	48 dokumen 2 dokumen	52.800.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	48 dokumen 2 dokumen		80.000.000
4 02 01 2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaianya dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %	232.620.000			100 %	275.000.000
4 02 01 2,05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Deserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah atribut pakaian yang dibeli/diadakan Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan Jumlah pakaian olahraga yang dibeli/diadakan Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan	Kab. Ngawi	45 buah 45 potong 70 stel 45 stel 45 pasang		[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	45 buah 45 potong 70 stel 45 stel 45 pasang		0

4	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ngawi	47 orang		232.620.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	47 orang	275.000.000
4	02	01	2,06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %		1.736.150.300	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2.740.000.000
4	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Kab. Ngawi	100 %		127.460.550	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	90.000.000
4	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Ngawi	100 %		194.653.150	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	600.000.000
4	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah air, isi ulang yang disediakan Jumlah makanan yang disediakan Jumlah minuman yang disediakan	Kab. Ngawi	100 galon 13075 kotak 13075 dus		533.040.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 galon 13075 kotak 13075 dus	700.000.000
4	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan Jumlah iklan/publikasi media cetak	Kab. Ngawi	2434 lembar 621815 lembar 360 kali		385.052.600	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2434 lembar 621815 lembar 360 kali	475.000.000
4	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	Kab. Ngawi	6935 eksemplar		18.604.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6935 eksemplar	85.000.000
4	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah iklan/publikasi media cetak Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri/dikuti Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/dikuti	Kab. Ngawi	360 kali 120 kali 120 kali		477.340.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360 kali 120 kali 120 kali	790.000.000
4	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %		391.509.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	250.000.000

4	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Kab. Ngawi	4 unit		391.509.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 unit.	250.000.000
4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %		1.205.563.556		100 %	923.000.000
4	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Kab. Ngawi	4 unit		2.965.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN TRANSFER	4 unit	25.000.000
4	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Iklan/Publikasi Media Cetak dan Elektronik Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar	Kab. Ngawi	48 rekening 24 rekening 12 rekening 24 rekening		614.481.750	[DANA UMUM] - PENDAPATAN TRANSFER	48 rekening 24 rekening 12 rekening 24 rekening	250.000.000
4	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli Jumlah bahan kebersihan yang dibeli Jumlah pembayaran jasa keamanan Jumlah pembayaran jasa kebersihan Jumlah pembayaran jasa operator	Kab. Ngawi	20 buah 2078 buah 96 kali 72 kali 24 kali		286.668.806	[DANA UMUM] - PENDAPATAN TRANSFER	2078 buah 96 kali 72 kali 24 kali	298.000.000
4	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor Jumlah pembayaran lembur	Kab. Ngawi	144 kali 144 kali		301.448.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN TRANSFER	144 kali 144 kali	350.000.000
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi	100 %		1.277.636.780		100 %	1.255.000.000
4	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ngawi	20 unit 240 kali		358.275.180	[DANA UMUM] - PENDAPATAN TRANSFER	20 unit 240 kali	575.000.000
4	02	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	Kab. Ngawi	360 kali		0	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360 kali	0
4	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	Kab. Ngawi	360 kali		293.450.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360 kali	275.000.000
4	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Ngawi	3.085 m2		458.161.600	[DANA UMUM] - PENDAPATAN TRANSFER	3.085 m2	225.000.000
4	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kab. Ngawi	72 kali		167.750.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72 kali	180.000.000
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dalam satu tahun	Kab. Ngawi	100 %		22.913.785.283		100 %	25.738.066.750
4	02	01	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab. Ngawi	100 %		22.207.420.283	[DANA UMUM] - PENDAPATAN TRANSFER	100 %	25.023.066.750

4	02	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Atribut DPRD dalam satu tahun Jumlah Penyediaan Pakaian Batik DPRD dalam satu tahun Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dalam satu tahun Jumlah Penyediaan Pakaian Olah Raga DPRD dalam satu tahun	Kab. Ngawi	45 set 45 stel 180 stel 45 stel	616.365.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45 set 45 stel 180 stel 45 stel	625.000.000
4	02	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD dalam satu tahun	Kab. Ngawi	1 kali	90.000.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 kali	90.000.000
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD dalam satu tahun	Kab. Ngawi	100 %	238.615.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	550.000.000
4	02	01	2,16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Administrasi Keanggotaan DPRD yang terselenggara	Kab. Ngawi	100 %	0	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	0
4	02	01	2,16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi DPRD yang terfasilitasi	Kab. Ngawi	6 fraksi	214.000.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 fraksi	275.000.000
4	02	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terfasilitasi	Kab. Ngawi	120 kali	24.615.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120 kali	275.000.000
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang tersedia	Kab. Ngawi	100 %	0	[DANA UMUM] - PENDAPATAN TRANSFER	100 %	0
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Setahun	Kab. Ngawi	80 %	17.794.106.500,00		85 %	24.999.880.000,00
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	Kab. Ngawi	23 Perda	3.191.060.000		23 Perda	4.600.000.000
4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang tersusun	Kab. Ngawi	23 Perda	2.366.745.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23 Perda	3.500.000.000
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terlaksana	Kab. Ngawi	23 Ranperda	445.675.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23 Ranperda	750.000.000
4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	Kab. Ngawi	5 dokumen	378.640.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 dokumen	350.000.000

4	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terselenggara	Kab. Ngawi 7 kali		865.560.000			7 kali	1.500.000.000
4	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang terselenggara	Kab. Ngawi 1 kali		144.260.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kali	250.000.000
4	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terselenggara	Kab. Ngawi 1 kali		144.260.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kali	250.000.000
4	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang terselenggara	Kab. Ngawi 1 kali		144.260.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kali	250.000.000
4	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang terselenggara	Kab. Ngawi 1 kali		144.260.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kali	250.000.000
4	02	2,02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang terselenggara	Kab. Ngawi 2 kali		144.260.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 kali	250.000.000
4	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang terselenggara	Kab. Ngawi 1 kali		144.260.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kali	250.000.000
4	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terlaksana dalam satu tahun	Kab. Ngawi 12 kali		7.361.250.000			12 kali	9.367.000.000
4	02	2,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang terlaksana dalam satu tahun	Kab. Ngawi 240 kali		1.622.425.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240 kali	2.050.000.000
4	02	2,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang terlaksana dalam satu tahun	Kab. Ngawi 240 kali		1.758.045.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240 kali	2.050.000.000
4	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana dalam satu tahun	Kab. Ngawi 240 kali		1.607.250.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240 kali	2.050.000.000
4	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dalam satu tahun	Kab. Ngawi 240 kali		1.607.550.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240 kali	2.050.000.000
4	02	2,03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dalam satu tahun	Kab. Ngawi 240 kali		144.260.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240 kali	200.000.000

4	02	02	2,03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran dalam satu tahun	Kab. Ngawi	240 kali		477.460.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240 kali	750.000.000
4	02	02	2,03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam satu tahun	Kab. Ngawi	12 kali		144.260.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 kali	217.000.000
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek dan bersertifikat	Kab. Ngawi	45 orang		2.249.852.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45 orang	4.229.100.000
4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek DPRD yang diikuti	Kab. Ngawi	6 kali		880.170.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 kali	2.029.100.000
4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan DPRD yang terpublikasi dan terdokumentasikan	Kab. Ngawi	264 kali		517.702.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	264 kali	550.000.000
4	02	02	2,04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	Kab. Ngawi	16 orang		108.000.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 orang	150.000.000
4	02	02	2,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	Kab. Ngawi	6 orang		0	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 orang	0
4	02	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Hubungan Masyarakat yang terselenggara	Kab. Ngawi	264 kali		743.980.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	264 kali	1.500.000.000
4	02	02	2,04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD yang tersusun	Kab. Ngawi	1 dokumen		0	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	0
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam satu tahun	Kab. Ngawi	100 %		1.624.027.500	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	2.053.780.000
4	02	02	2,05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Ngawi	100 %		0	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	0
4	02	02	2,05	02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	Kab. Ngawi	438 Pokir DPRD		29.657.500	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	438 Pokir DPRD	25.000.000
4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses dalam satu masa sidang per tahun	Kab. Ngawi	3 kali		1.594.370.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 kali	2.028.780.000
4	02	02	2,06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Ngawi	100 %		346.845.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	300.000.000

4	02	02	2,06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode etik DPRD yang tersusun	Kab. Ngawi	1 dokumen	79.682.500	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	150.000.000
4	02	02	2,06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode etik DPRD yang terlaksana	Kab. Ngawi	360 kali	267.162.500	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360 kali	150.000.000
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Ngawi	100 %	2.155.512.000		100 %	2.950.000.000
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terseleenggara	Kab. Ngawi	120 kali	1.239.871.600	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120 kali	1.450.000.000
4	02	02	2,08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	Kab. Ngawi	1 dokumen	475.170.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	750.000.000
4	02	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Kajian Kinerja DPRD yang terfasilitasi Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang terfasilitasi	Kab. Ngawi	2 dokumen 48 kali	440.470.400	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 dokumen 48 kali	750.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2021 – 2026.

Rencana Kerja Tahun 2023 memuat strategi dan kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi. Namun demikian kita menyadari bahwa dalam pelaksanaannya sering terjadi ketersediaan dana dengan kebutuhan tidak sesuai, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas. Maka dari itu pada akhir tahun sering terjadi pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai target yang direncanakan karena terbatasnya dana.

Pada prinsipnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergi dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian-bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi agar mendukung pencapaian target-target dalam Rencana Kerja tahun 2023 dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat tercapai.
3. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun ke I (pertama) dalam Rencana Strategis, yang berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan. Dengan demikian Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Kerja secara berkala.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

